



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

INFO LEGISLASI

27 April 2022



**Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Perubahan Undang-Undang
(UU) nomor 23 tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat.**



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

RUU tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan RUU usul inisiatif DPR. Badan Keahlian (BK) DPR RI diminta untuk membuat draf NA dan RUU perubahan UU tersebut. Saat ini NA dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sedang dalam tahap penyusunan di Pusat PUU BK DPR RI. Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait dengan adanya perkembangan lembaga *crowdfunding* dan kebutuhan hukum masyarakat terkait dengan pengelolaan zakat. Selain itu, pengaturan pengelolaan zakat sudah tidak memadai untuk optimalisasi pengelolaan zakat.

Beberapa isu penting terkait dengan urgensi perubahan antara lain yaitu: a. masih terjadi perdebatan terkait sentralisasi pengelolaan zakat, keberadaan lembaga pengelola zakat di masyarakat, dan persyaratan pendirian lembaga amil zakat (LAZ); b. keberadaan BAZNAS sebagai operator dan regulator; c. implementasi pembayaran zakat yang dapat diperhitungkan dalam pajak penghasilan; dan d. Kewajiban zakat bagi badan usaha.



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

**SAHABAT PUU DAPAT MENGAkses INFO
LEGISLASI DI LAMAN WEBSITE PUU DENGAN
SCAN BARCODE DI BAWAH INI YA.**



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAM

INFO LEGISLASI

27 April 2022

“

Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Satu Data Indonesia

”



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

RUU tentang Satu Data Indonesia merupakan RUU usul inisiatif DPR. Badan Keahlian (BK) DPR RI diminta untuk membuat draf NA dan RUU tersebut. Saat ini draf NA dan RUU tentang Satu Data Indonesia sedang dalam tahap penyusunan di Pusat PUU BK DPR RI. Penyusunan RUU tersebut terkait dengan upaya untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi era digital guna memacu pertumbuhan pembangunan nasional. Selain itu keterbukaan data juga mendukung terciptanya prinsip-prinsip dalam prasyarat demokrasi yang menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Sehingga negara perlu memberikan dukungan terhadap perkembangan teknologi informasi di bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta pengintegrasian data di antara instansi pemerintah. Beberapa isu penting terkait dengan urgensi penyusunan RUU tersebut antara lain: a. belum terakomodirnya penggunaan data yang cepat dan tepat dalam suatu kebijakan; b. pengelolaan data perlu dilakukan dengan mengintegrasikan data kepada seluruh pemangku kepentingan masyarakat.



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

**SAHABAT PUU DAPAT MENGAkses INFO
LEGISLASI DI LAMAN WEBSITE PUU DENGAN
SCAN BARCODE DI BAWAH INI YA.**



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI,
DAN PEMBANGUNAN**

INFO LEGISLASI

27 April 2022

“

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

”



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan RUU usul inisiatif DPR. Badan Keahlian (BK) DPR RI diminta untuk membuat draf NA dan RUU perubahan UU tersebut. Saat ini NA dan RUU perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedang dalam tahap penyusunan di Pusat PUU BK DPR RI.

Setelah berlaku selama 23 Tahun, UU ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dunia usaha saat ini. Perkembangan dunia usaha yang pesat menimbulkan tantangan berupa munculnya potensi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum persaingan usaha perlu diperkuat dengan melakukan perubahan UU ini yang diharapkan dapat menciptakan kondisi perekonomian yang bersifat terbuka dengan mendorong iklim usaha yang sehat, efisien, dan kompetitif. Adapun beberapa isu penting terkait dengan urgensi penyusunannya terkait dengan:

a. Prinsip ekstrateritorialitas dalam penegakan hukum; b. Penegasan kedudukan, tugas, dan kewenangan KPPU; c. Penerapan *leniency program* dalam penanganan kartel; dan d. Integrasi perubahan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

**SAHABAT PUU DAPAT MENGAkses INFO
LEGISLASI DI LAMAN WEBSITE PUU DENGAN
SCAN BARCODE DI BAWAH INI YA.**



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr